

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR POTENSIAL YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Yoga Wisnu Prayuda, Johan Arifin

Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
E-mail: yogawisnu69@gmail.com, Johan.arifin@uui.ac.id

ABSTRAK

kata kunci:

Kinerja keuangan;
Leverage; PAD;
Tingkat
ketergantungan
keuangan; Total aset

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia pasca covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 80 kota dan kabupaten di Indonesia dengan jangka waktu 5 tahun. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa total aset, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah, dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan, jumlah penduduk daerah, PAD, dan IPM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

keywords:

Financial performance,
leverage, local revenue,
level of financial
dependency, total assets

This study aims to empirically examine the factors that have potential to affect the financial performance of local government in Indonesia after covid-19. The population in this study were all cities and regencies throughout Indonesia. The sample used was 80 cities and district in Indonesia with a period of 5 years. The results revealed that total assets, the level of financial dependence of local government financial performance, and leverage affect government financial performance. Meanwhile, local population, local revenue, and HDI have no effect on government financial performance..

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pandemi penyakit covid-19 telah membawa dampak besar terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat dan penutupan bisnis yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus telah mengganggu aktivitas ekonomi (Abubakar, 2020). Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana pandemi covid-19 mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia (Adinata & Efendi, 2022). Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan daerah pasca-pandemi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut (SAFITRI, 2021).

Laporan keuangan pemerintah yang diterbitkan setiap tahun oleh pemerintah daerah merupakan salah satu cerminan kinerja pemerintahan dalam periode tertentu (Alfi & Sari, 2023). Namun, pandemi covid-19 yang melanda selama dua tahun terakhir ini diduga telah memberikan dampak kurang baik terhadap kinerja keuangan negara (Arifin, 2017). Hal ini bisa dilihat provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 169 M dan PAD dari kota Jakarta mengalami penurunan sebesar 50 persen pada tahun 2020 (Ariyanto, 2020). Kinerja keuangan pemerintah yang memburuk berpotensi memicu penurunan kinerja ekonomi secara keseluruhan, ditandai dengan peningkatan inflasi (Alfi & Sari, 2023). Untuk mengatasi kondisi ini, salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah dengan mengoptimalkan penggunaan dana cadangan negara (Antari & Sedana, 2018).

Dari berbagai permasalahan yang muncul, kita bisa melihat bahwa kinerja keuangan menjadi patokan penting untuk menilai seberapa baik pemerintah mengelola anggaran negara (Astuti & Mispriyanti, 2019). Masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah yang memiliki kinerja keuangan yang baik (Banunaek et al., 2022). Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ini, salah satunya adalah aspek ukuran pemerintah daerah, daerah yang besar memang punya kebebasan yang lebih luas dalam menjalankan

pemerintahan, tapi ukuran pemerintah juga bisa membuat proses pengambilan keputusan jadi lebih rumit dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana (Dewanti et al., 2022).

Aspek kedua adalah jumlah penduduk daerah (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Jumlah penduduk yang besar di suatu daerah bisa menjadi berkah dan juga tantangan bagi pemerintah daerah (Karno & Alliyah, 2021). Penduduk yang banyak berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah (Kurniadi & Wardoyo, 2022). Akan tetapi, semakin banyak penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan pelayanan publik seperti pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur (Mahdiana & Amin, 2020). Ini berarti pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Manafe et al., 2023).

Aspek yang ketiga adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Ketergantungan pemerintah daerah pada pusat merupakan masalah yang serius (Maulina et al., 2021). Hal ini dikarenakan, kondisi ini dapat menghambat inisiatif dan kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber dayanya (Mulyani & Wibowo, 2017). Terlalu bergantung pada dana pusat juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi pembangunan antar daerah (Fauzan et al., 2020).

Aspek yang keempat adalah *leverage* atau tingkat utang pemerintah daerah. Utang dapat menjadi salah satu sebagai katalis dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Akan tetapi, tingginya rasio utang berpotensi untuk menimbulkan risiko finansial jangka Panjang (Mappiasse, 2018).

Aspek yang kelima adalah pendapatan asli daerah atau PAD yang berperan krusial sebagai landasan finansial bagi pemerintah daerah (Nurhayati & Hamzah, 2020). Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk pembangunan dan pelayanan ke masyarakat (Padang & Padang, 2023). Semakin besar pendapatan daerah, semakin banyak pula yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat (Pratama et al., 2022). Sebaliknya, jika pendapatan daerah minim, maka kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan juga terbatas (Primadiva et al., 2021).

Berdasarkan kajian awal, penelitian ini akan menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Faktor yang diteliti mencakup total aset pemerintah daerah, jumlah penduduk daerah, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah, *leverage*, dan juga pendapatan asli daerah. Sebagai inovasi, penelitian ini memasukkan indeks pembangunan manusia atau IPM sebagai variabel kontrol untuk mengukur sejauh mana kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dari indikator Kesehatan, Pendidikan, dan standar hidup, berkontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur kekuatan hubungan antara sejumlah faktor, seperti total aset, jumlah penduduk, dan tingkat ketergantungan daerah, *leverage*, dan PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendekatan kuantitatif asosiatif dipilih sebagai kerangka analisis, dengan mempertimbangkan satu variabel kontrol dalam model. Penelitian ini akan menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data numerik dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penggunaan data kuantitatif ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang lebih akurat dan dapat diuji secara statistic.

Penelitian ini berfokus pada seluruh pemerintah daerah sebagai populasi. Sebagai unit analisis, penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2018-2022.

Pengukuran Variabel

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah didefinisikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban suatu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu, mencakup pula segala bentuk kekayaan yang dapat dimiliki daerah sebagai akibat dari hak dan kewajiban tersebut. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan:

$$\frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$$

Total Aset

Ukuran pemerintah daerah merujuk pada skala sumber daya yang dialokasikan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di suatu wilayah. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Jumlah Penduduk Daerah

Jumlah penduduk suatu daerah merupakan penghitungan seluruh individu yang bertempat tinggal di wilayah tersebut selama periode minimal satu semester. Kriteria ini mencakup seluruh individu, tanpa memandang status pekerjaan. Metode penghitungan populasi didasarkan pada durasi tempat tinggal, yaitu individu yang telah berdomisili selama minimal enam bulan.

Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tercermin dari besaran transfer dana yang dialokasikan dari pusat ke daerah. Tingkat ketergantungan daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Tingkat ketergantungan daerah} = \frac{\text{Dana alokasi umum}}{\text{total pendapatan daerah}}$$

Leverage

Leverage keuangan merupakan kemampuan suatu pemerintahan dalam mengoptimalkan sumber daya finansial yang ada, baik melalui pinjaman maupun instrumen keuangan lainnya, untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. *Leverage* dapat diukur menggunakan rasio debt to equity ratio:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{total utang}}{\text{ekuitas}} \times 100$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah kontribusi finansial yang diperoleh pemerintah daerah secara otonom dari wilayahnya, yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pendapatan asli daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{PAD tahun 1}}{\text{PAD tahun} - 1} \times 100$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	n	Minimu m	Maximum	Mean	Standard Deviation
Total aset	400	27,812	31,579	29,011	0,812
Jumlah penduduk	400	34,654	3,3622,450	576,280	665,267
Tingkat ketergantungan keuangan	400	0,124	1,097	0,440	0,127
<i>Leverage</i>	400	0,0003	0,2220	0,0200	0,0281
PAD	400	0,525	10,832	1,067	0,522
IPM	400	7,03	87,72	76,022	6,133
Kinerja keuangan	400	0,090	1,284	0,879	0,1280

Sumber: Data Sekunder SPSS, 2024

Tabel 1, ditunjukkan bahwa total aset memiliki nilai minimum sebesar 27,812 dan nilai maksimum sebesar 31,579 dan rata-rata sebesar 29,011 dengan standar deviasi sebesar 0,812. Jumlah penduduk memiliki nilai minimum sebesar 34,654 dan nilai maksimum sebesar 3.3622 dan rata-rata sebesar 576.280 dengan nilai standar deviasi sebesar 665,267. Tingkat ketergantungan keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0,124 dan nilai maksimum sebesar 1,097 dan rata-rata sebesar 0,440 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,127. *Leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,0003 dan nilai maksimum sebesar 0,2220 dan nilai rata-rata sebesar 0,0200 dengan standar deviasi sebesar 0,0281. PAD memiliki nilai minimum sebesar 0,525 dan nilai maksimum sebesar 10,832 dan nilai rata-rata sebesar 76,022 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,522. IPM memiliki nilai minimum sebesar 7,03 dan nilai maksimum sebesar 87,72 dan nilai rata-rata sebesar 76,022 dengan nilai standar deviasi sebesar 6,133. Kinerja keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0,090 dan nilai maksimum sebesar 1,284 dan nilai rata-rata sebesar 0,879 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1280.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Pengujian Normalitas Setelah Outlier One Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
n	355

Asymp Sig. 0,200

Sumber: Data Sekunder SPSS, 2024

Tabel 2 merupakan hasil dari pengujian normalitas *One Kolmogorov-Smirnov Test* yang menggunakan data sebanyak 355 yang sebelumnya 400 data. Setelah dieliminasi dengan metode boxplot data penelitian memiliki nilai asymp sig sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Maka dari itu data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Total aset	0,251	3,984
Jumlah penduduk	0,326	3,066
Tingkat ketergantungan keuangan	0,372	2,689
Leverage	0,974	1,027
PAD	0,984	1,016
IPM	0,929	1,077

Sumber: Data Sekunder SPSS, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada semua variabel memiliki nilai tolerance dibawah 0,10. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi fenomena multikolinearitas pada variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.
Total aset (X_1)	0,836
Jumlah penduduk (X_2)	0,481
Tingkat ketergantungan keuangan (X_3)	0,439
Leverage (X_4)	0,127
PAD (X_5)	0,804
IPM (X_6)	0,878

Sumber: Data Sekunder SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4 ditunjukkan bahwa masing-masing variabel independen dalam penelitian ini mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dari itu model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Tipe variabel	Prediksi	Eliminasi outlier n = 355			keterangan
			T-Stat	B	Sig	
Konstanta			-2,319	-3,064	0,21	
TA	independen	+	2,334	0,993	0,020*	Didukung
JPD	Independen	+	-1,975	-0,022	0,049**^	Tidak didukung
TKK	Independen	+	3,607	0,107	0,000*	Didukung
Leverage	Independen	+	3,750	0,019	0,000*	Didukung
PAD	Independen	+	-0,418	-0,012	0,676	Tidak didukung
IPM	Kontrol		0,324	0,014	0,746	

Adj R2: 0,092

F: 7,009

Sig: 0,000

Sumber: Data Olahan SPSS, 2024

* hipotesis didukung ** beda arah antara hipotesis dengan koefisien regresi

Legend: TA= total aset dari ukuran pemerintah daerah, JPD=jumlah penduduk yang tinggal, TKK=Tingkat ketergantungan keuangan, *leverage*=jumlah utang, PAD=pendapatan asli daerah, IPM=indeks Pembangunan manusia

Dari Tabel 5 diturunkan model penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = -2,319 + 2,334.X_1 - 1,975.X_2 + 3,607X_3 + 3,750X_4 - 0,418X_5 + 0,324X_6$$

Konstanta menunjukkan angka sebesar -3,064 dan apabila ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk daerah, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah, *leverage*, PAD, dan IPM bernilai nol maka kinerja keuangan sebesar 3,064. Total aset memiliki nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,993 yang berarti setiap kenaikan ukuran pemerintah daerah sebesar satu satuan maka akan mampu menaikkan kinerja keuangan sebesar pemerintah daerah 0,993; Jumlah penduduk memiliki nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,022 yang berarti setiap kenaikan jumlah penduduk daerah sebesar satu satuan maka akan mampu menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,022; Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah memiliki nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,107 yang berarti setiap kenaikan tingkat ketergantungan keuangan sebesar satu satuan maka mampu menaikkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,107; *Leverage* memiliki nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,019 yang berarti setiap kenaikan *leverage* sebesar satu satuan mampu menaikkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,019; PAD memiliki nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,012 yang berarti setiap kenaikan PAD sebesar satu satuan mampu menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,012; IPM memiliki nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,014 yang berarti setiap kenaikan IPM sebesar satu satuan mampu menaikkan kinerja keuangan sebesar 0,014.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi pada adjust R square memberikan nilai sebesar 0,092 atau 9,2 persen sedangkan sisanya 90,8 persen dijelaskan secara independen oleh variabel lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil koefisien korelasi (R) memberikan nilai 0,328 sehingga dapat dikatakan koefisien korelasi tersebut sedang atau cukup kuat karena berkisar antara 0,300 hingga 0,499.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Berdasarkan Tabel 5 ditunjukkan bahwa dengan level signifikansi sebesar 0,000 maka dapat dikatakan bahwa keenam variabel tersebut telah memenuhi *goodness of fit* model.

Uji t

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa total aset memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05 maka dari itu total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; Jumlah penduduk daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,049 namun memiliki nilai t sebesar -1,975 maka jumlah penduduk daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; Tingkat ketergantungan keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dari itu tingkat ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; *Leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dari itu *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan; PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,676 lebih besar dari 0,05 maka dari itu PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; IPM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,746 lebih besar dari 0,05 maka dari itu IPM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) ukuran pemerintah daerah yang diprosikan total aset berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (2) jumlah penduduk daerah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (3) tingkat ketergantungan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (4) *leverage* berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (5) PAD tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (6) IPM tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2020). Financial Leverage And Financial Performance Of Oil And Gas Companies In Nigeria. *Open Journal Of Management Science* (ISSN: 2734-2107), 1(1), 28–44.
- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Pemerintahan Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(2).
- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(3), 1098–1114.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Udayana University.
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 Untuk Penelitian Dan Skripsi*. Elex Media Komputindo.
- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Valuta*, 6(1), 41–54.
- Astuti, S., & Mispiyanti, M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, Dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada Di Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Banunaek, I. A., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 49–59.
- Dewanti, A. C., Masnila, N., & Aprianti, S. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi. *Akuntanika*.
- Fauzan, M., Nusantara, A., Nawatmi, S., & Santosa, A. B. (2020). Indeks Pembangunan Manusia Dan Pendidikan Di Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 27(1).
- Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1).
- Karno, D. K. S., & Alliyah, S. (2021). The Influence Of Local Government Characteristics And BPK Audit Opinion On The Financial Performance Of District. City Governments In Central Java Province, 3(1), 40–55.
- Kurniadi, A. F., & Wardoyo, D. U. (2022). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Dalam Perspektif Teori Agensi:(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2020). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 141–150.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Manafe, H. A., Niha, S. S., & Putra, D. P. S. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541–547.
- Mappiasse, A. L. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan. *Bongaya Journal Of Research In Accounting (BJRA)*, 1(2), 51–55.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JISAMAR (Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research)*, 5(2), 390–399.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 1(1).
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303–318.
- Pratama, A. B., Maslichah, M., & Mawardi, M. C. (2022). Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(02).
- Primadiva, P. P., Rosdini, D., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh Tingkat Kekayaan Dan Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 299–310.

Safitri, M. D. W. I. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya.